

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sasaran penting dari Pembangunan Ekonomi tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik, yang ditunjukkan oleh kemajuan perekonomian masyarakat di daerah tersebut dan digambarkan oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik.

Setiap pembangunan ekonomi pada setiap wilayah, idialnya harus dimulai dari tersusunnya perencanaan yang detail dan komprehensif, selain melibatkan pelaku pembangunan juga harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di daerah tersebut.

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembangunan nasional yang pada hakekatnya membangun manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong stabilitas, dan meningkatkan potensi daerah secara terpadu.

Setiap rencana detail dari perencanaan pembangunan memuat sasaran dan tujuan serta besarnya pembiayaan pembangunan, supaya kelayakan dan manfaat pada satu kegiatan dapat teruji serta kinerjanya dapat terukur.

Sasaran utama dari usaha pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus dapat menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran

Pelaksanaan pembangunan ekonomi baik yang telah, sedang, dan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan pemeratakan hasil-hasil pembangunan.

Perkembangan ekonomi merupakan salah satu wujud dari pembangunan yang telah dilakukan pada seluruh sektor ekonomi, dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi tingkat ketimpangan dan kesenjangan distribusi pendapatan ekonomi dan kesenjangan sosial.

Kesenjangan distribusi pendapatan yang dimaksud adalah ukuran ketimpangan pendapatan yang merupakan suatu keadaan dimana distribusi pendapatan masyarakat menunjukkan keadaan yang tidak merata dan lebih menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.

Ketersediaan data sangat penting, salah satu data indikator ekonomi yang mendukung perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah Data Statistik Pendapatan Regional yang lebih dikenal dengan *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*, data ini juga digunakan untuk mengevaluasi upaya dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini.

Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah banyak melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, Kabupaten Lampung Barat mengarahkan pembangunan daerahnya untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi alam yang ada serta membangun sumber daya manusia guna mencapai pemerataan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja.

Hasil pembangunan Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dari Tabel 1.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Menurut Harga Konstan Tahun 2000 di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2006-2012

Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)	Laju Pertumbuhan (Persen)
2006	4.421,429	-
2007	4.562,061	3,16
2008	4.712,600	3,30
2009	4.933,721	4,69
2010	5.156,165	4,52
2011	5.406,824	4,85
2012	5.720,055	5,80

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat tahun 2006-2012 menurut harga konstan tahun 2000 relatif mengalami kenaikan dan cukup stabil. Pada tahun 2007, PDRB Kabupaten Lampung Barat sebesar 4.562.061.000,00 dan pada tahun 2008 menjadi 4.712.600.000,00, atau mengalami kenaikan sebesar 3,30 persen dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten ini tahun 2009 hingga 2010 mengalami penurunan dari 4,69 persen menjadi 4,52 persen, dan pada tahun-tahun berikutnya kembali mengalami kenaikan. Tahun 2010 (PDRB) Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 5.156.165.000,00 sedangkan pada tahun 2011 PDRB sebesar Rp. 5.406.829.000,00 atau perkembangan ekonomi mengalami kenaikan sebesar

4,85 persen. Perkembangan ekonomi terbesar terjadi pada tahun 2011 - 2012, yaitu dari 4,85 persen menjadi 5,80 persen.

Pada dasarnya kemajuan perekonomian di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dari laju perkembangan ekonominya. Pada tahun 2012 setiap sektornya mengalami peningkatan kecuali pada sektor transportasi dan komunikasi. Penyebab naiknya laju pertumbuhan ekonomi tersebut adalah meningkatnya produksi di sektor pertanian, karena seperti yang telah kita ketahui bahwa penyumbang kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Barat adalah sektor pertanian, sehingga apabila terjadi penurunan produksi pada sektor ini dapat mempengaruhi sektor yang lain.

Biasanya indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat kemakmuran atau kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah dari besar kecilnya pendapatan perkapita penduduk. Karena gambaran dari pendapatan perkapita sekaligus menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasanya, selain itu bias berdampak pada perubahan harga, jumlah uang beredar, produktifitas produksi dan kesempatan kerja.

Nilai pendapatan perkapita penduduk suatu daerah diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang biasa disebut dengan PDRB Perkapita. Sedangkan nilai pendapatan regional perkapita suatu daerah diperoleh dengan cara menghilangkan terlebih dahulu pengaruh penyusutan dan pajak tidak langsung terhadap PDRB kemudian membagi nilai tersebut dengan jumlah penduduk pertengahan tahu

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Menurut Harga Berlaku di Kabupaten Lampung Barat Periode Tahun 2007-2012.

Tahun	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)	Laju Pertumbuhan (Persen)
2007	3.464.737	-
2008	3.526.340	0,03
2009	3.638.962	0,04
2010	3.748.982	0,04
2011	3.861.250	0,03
2012	3.777.561	0,02

Sumber : Badan Pusat Statistik kabupaten lampung barat 2013

Tabel 2 gambaran dari laju pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Lampung Barat selama Tahun 2007-2012. Laju pertumbuhan per kapita pada tahun 2007 sebesar Rp. 3.464.737,00 dan mengalami kenaikan pada tahun 2008 yaitu menjadi Rp. 3.526.340,00. Tahun 2009, Pendapatan per kapita mencapai Rp. 3.638.962,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,04 persen dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2011 hingga tahun 2012 persentase laju pertumbuhan pendapatan perkapita kembali mengalami penurunan sebesar 0,02 persen.

Secara umum, ketimpangan distribusi pendapatan di Propinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Pendapatan Penduduk Menurut Bank Dunia dan Indeks Gini Provinsi Lampung Tahun 2007 - 2012

Tahun	40% Rendah	40% Sedang	20% Tinggi	Indeks Gini
2007	21,04	42,84	36,12	0,349
2008	19,66	44,89	35,45	0,298
2009	29,28	49,19	21,53	0,274
2010	18,69	40,60	40,71	0,251
2011	19,49	32,09	48,42	0,218
2012	20,14	37,22	42,64	0,235

Sumber : Badan Pusat Statistik 2013

Pada Tabel 3, indeks gini pada tahun 2007 – 2012 menunjukkan angka kurang dari 0,35. Hal ini berarti ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung pada umumnya dikategorikan sebagai ketimpangan pendapatan yang ringan. Golongan 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah juga memperlihatkan angka yang cukup memuaskan, yaitu pada tahun 2007 mencapai 21,04 persen, dan pada tahun 2008 sebesar 19,66 persen. Meskipun pada tahun 2009 golongan 40 persen rendah mengalami kenaikan sebesar 9,62 persen, namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2010 kembali mengalami penurunan yang cukup besar yaitu menjadi 18,69 persen, dan cukup stabil pada tahun 2012 yaitu sebesar 19,14 persen. Pada tahun 2012, terjadi kenaikan pada golongan 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah yaitu menjadi 20,14 persen yang juga disertai dengan kenaikan pada golongan 40 persen penduduk dengan pendapatan sedang dan penurunan pada golongan 20 persen penduduk dengan penghasilan tinggi, hal ini mengakibatkan indeks gini meningkat menjadi 0,235.

Dengan melihat perkembangan distribusi pendapatan pada golongan 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepincangan pembagian pendapatan tergolong rendah/ringan.

B. Permasalahan

Kondisi ideal dari perencanaan strategis pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah Strategi Pembangunan yang menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan ditargetkannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus meningkat, maka diharapkan tingkat ketimpangan pendapatan akan berkurang dengan sendirinya.

Atas dasar kondisi diatas, maka penulis mengambil suatu permasalahan sebagai berikut : **“Apakah terjadi korelasi negatif antara kesenjangan distribusi pendapatan dengan perkembangan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat”**.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi negatif antara kesenjangan distribusi pendapatan dengan perkembangan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat.

D. Kerangka Pemikiran

Pembangunan merupakan upaya bersama yang dilakukan pemerintah beserta rakyat dalam mewujudkan cita-cita nasional. Agar pembangunan tersebut berhasil maka dibutuhkan suatu perencanaan pembangunan yang tepat, terarah, efektif, dan efisien. Oleh karena itu adanya data-data statistik yang mampu mengevaluasi seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sangatlah penting.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan yang bersifat terus-menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan kearah yang ingin dicapai.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kearah pengurangan dan penghapusan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi yang sedang berkembang.

Gunar Myrdall berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan yang semakin banyak dan membuat si miskin semakin terhambat. Dampak balik

cenderung membesar namun dampak sebar cenderung mengecil. Secara komulatif kecenderungan ini memperbesar ketimpangan regional (M.L.Jhingan, 1999:211).

Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan regional antar daerah semakin besar. Diduga hal ini disebabkan oleh pertumbuhan PDRB dan pelaksanaan pembangunan yang tidak merata di tiap-tiap daerah sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah.

Kebanyakan para pengamat ekonomi menyatakan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendapatan akan sangat timpang pada saat pertumbuhan ekonomi diubah pada waktu yang sangat cepat. Ikhtisar yang berguna mengenai kemana tingkat pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan itu ditunjukkan untuk perbaikan bagi kelompok yang berpenghasilan tinggi dan kelompok yang berpenghasilan rendah adalah merupakan persimpangan positif atau negatif atau ukuran (perasaan atau kemiskinan) indeks kesejahteraan yang sebenarnya (M.P.Todaro, 1993:221).

Laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat merupakan hal yang sangat diharapkan dan diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan pemerataan pendapatan merupakan sasaran dan tinjauan dari pembangunan ekonomi, sehingga ketimpangan pendapatan yang terjadi dalam masyarakat tidak semakin curam.

Kesenjangan dan ketimpangan pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini tercermin dari perbedaan pendapatan (Robert E Baldwin, 1986 : 16).

Masalah ketimpangan pendapatan sering juga diikhtisarkan, bahwa pendapatan riil dari yang kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang.

Ini berarti bahwa pendapatan riil dari yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin (Bruce Herrick/Charles P Kindleberger, 1988 : 171).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut. Akibat dari perbedaan itu maka akan terlihat kesenjangan yaitu yang kaya akan semakin kaya dan sebaliknya yang miskin akan semakin terpuruk

Ada beberapa metode perhitungan yang dipakai oleh para ahli ekonomi dalam mengukur ketimpangan pendapatan. Sebuah ukuran yang sangat ringkas dan mudah untuk dimengerti mengenai ketimpangan pendapatan dalam suatu negara atau daerah bisa diperoleh dengan menghitung rasio area antara garis diagonal Kurva Lorenz dibandingkan dengan jumlah area setengah/separuh bagian dari bujur sangkar di mana tempat kurva itu. Rasio ini dikenal dengan nama Rasio Koefisien Gini atau Koefisien Gini. Nama Koefisien Gini diambil dari nama seorang ahli statistik Italia yaitu C. Gini, orang pertama yang memformulasikan hal tersebut pada tahun 1912.

Apabila kita menganalisa determinasi-determinasi yang nyata mengenai pemerataan penghasilan, maka yang terlihat sangat timpang adalah pemerataan pemilikan kekayaan atau harta yang produktif seperti tanah dan modal dalam segmen-segmen yang berbeda dalam masyarakat, hal ini yang pada umumnya menyebabkan perbedaan penghasilan yang besar sekali antara si kaya dan si miskin.

Semula banyak ahli yang berpendapat bahwa proses pembangunan akan mampu menyebarkan hasilnya secara otomatis kepada penduduknya dengan pendapatan yang berlainan tingkat. Mula-mula kelompok yang berpenghasilan tinggi akan memetik hasil pembangunan lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan dengan kelompok penduduk berpenghasilan rendah.

Dengan pembangunan ekonomi dan peningkatan pembangunan memungkinkan terjadinya pemerataan penghasilan yang lebih luas sehingga dapat menjangkau kelompok penduduk yang berpendapatan rendah. Perkembangan meluasnya pembagian pendapatan ini dilakukan dengan cara pendistribusian pendapatan tinggi atau kaya ke kelompok penduduk berpendapatan rendah atau miskin (Emil Salim, 1984:45).

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini akan disajikan dalam lima bagian pokok yang dirinci sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III : Metodologi Penelitian yang berisikan tentang penelitian lapangan, alat analisis, dan gambaran umum Kabupaten Lampung Barat .

Bab IV : Hasil perhitungan dan pembahasan yang meliputi pembuktian analisis.

Bab V : Simpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran